

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif serta pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha pengembangan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kampung adalah diterima. Koefisien jalur standardize yang diperoleh adalah sebesar 0,170 dengan p bersifat fix, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam program KIP-K, peningkatan usaha pengembangan masyarakat dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial masyarakat kampung. Hal ini sesuai dengan Teori Todaro yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dapat mensejahterakan masyarakat yang dibangun. Pengaruh ini utamanya dirasakan pada bantuan kredit usaha yang mampu menaikkan pendapatan secara signifikan, meskipun naiknya pendapatan ini belum mampu menaikkan kesejahteraan sampai ketinggian sejahtera. Pelatihan ketrampilan juga dirasakan sangat bermanfaat, namun pelaksanaan masih kurang sehingga hanya beberapa responden yang bisa merasakannya. Pembinaan usaha kecil boleh dikatakan dirasakan sangat kurang. (lihat Tabel 5.20)
2. Perkembangan fisik lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial Masyarakat Kampung adalah diterima. Koefisien jalur standadize yang diperoleh adalah sebesar 0,278 dengan p bersifat fix,

dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam program KIP-K, perkembangan lingkungan fisik dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial masyarakat kampung. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan tertata serta fasilitas kesehatan yang memadai sangat berpengaruh terhadap perasaan sehat, aman dan nyaman yang merupakan dasar rasa sejahtera selain kecukupan dalam kebutuhan hidup (basic needs). Hanya di beberapa kalurahan yang masih kurang didalam memanfaatkan fasilitas sanitasi lingkungan (WC, MCK, tempat sampah). Hal ini disebabkan masih kentalnya budaya mengabaikan kebersihan dan belum terciptanya transformasi budaya bersih karena kurangnya sosialisasi tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal yang demikian ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dikemudian hari. Kondisi seperti ini (belum tercapainya transformasi budaya) bertentangan dengan teorinya Blum tentang paradigma kesehatan; yang mengatakan dinegara berkembang faktor yang dominan mempengaruhi kesehatan adalah faktor lingkungan sementara di negara yang maju adalah faktor perilaku. Temuan dari studi ini kesehatan lebih ditentukan oleh kentalnya budaya (perilaku).

3. Perkembangan manajemen lahan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kampung.. Koefisien jalur standadize yang diperoleh adalah sebesar 0,234 dengan $p = 0,219$, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis nonsignifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa program KIP belum mampu memperbaiki

perkembangan manajemen lahan yang kemudian dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial Masyarakat kampung. Hal ini disebabkan pelaksanaan program ini dilaksanakan hanya pada tahun 2002 (lihat Tabel 5.21), itupun hanya diberikan pada beberapa persil saja, sehingga pengaruhnya sangat kecil atau bahkan tidak berpengaruh. Program ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebab selain biayanya relatif mahal bagi masyarakat berpendapatan rendah, juga prosesnya dirasakan berbelit-belit, dan membutuhkan waktu yang lama

4. Usaha pengembangan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Masyarakat adalah diterima. Koefisien jalur standadize yang diperoleh adalah sebesar 0,756 dengan p bersifat fix, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam program KIP, peningkatan usaha pengembangan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian masyarakat kampung.

Pengaruh ini utamanya dirasakan dalam kemandirian masyarakat didalam berpartisipasi terhadap pembangunan kampung, sekalipun hanya didalam bentuk tenaga. Hal ini didorong oleh terbentuknya berbagai lembaga kampung yang dibentuk dalam pelaksanaan program KIP-K. Namun kurang dirasakan dalam kemandirian pengadaan modal usaha, karena minimnya pengetahuan tentang mengelola usaha serta pemasaran, sehingga sulit untuk mengadakan deversifikasi usaha dan juga reinvestasi.

5. Perkembangan fisik lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Masyarakat adalah diterima. Koefisien jalur standardized yang diperoleh adalah sebesar 0,413 dengan p bersifat fix, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam program KIP, perkembangan fisik lingkungan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat kampung. Pengaruh ini dirasakan utamanya adanya bantuan perbaikan rumah mendorong warga untuk menggunakan uangnya untuk memperbaiki/ menyempurnakan rumahnya, sehingga kampung bisa tertata lebih rapi dan bersih. Program ini juga menggugah kesadaran masyarakat untuk memelihara komunitas infrastruktur yang ada.
6. Perkembangan manajemen lahan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Masyarakat . Koefisien jalur standadize yang diperoleh adalah sebesar -1,686 dengan $p = 0,268$, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis nonsignifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa program KIP-K belum mampu memperbaiki perkembangan manajemen lahan yang kemudian dapat meningkatkan kemandirian masyarakat Minimnya pelaksanaan program ini (lihat Tabel 5.21), menyebabkan warga kurang bersemangat untuk mengurus sertikat tanah maupun surat izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Kesejahteraan sosial masyarakat kampung berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Masyarakat adalah diterima. Koefisien jalur standadize yang diperoleh adalah sebesar 3,154 dengan $p = 0,002$, dengan demikian diperoleh keputusan hasil pengujian hipotesis signifikan. Hal ini

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat kampung diikuti oleh semakin baik tingkat kemandiriannya.

8. Pembangunan/perbaikan kampung miskin kumuh dilaksanakan melalui melalui 3 program KIP-K Tahun 2002–2003 yaitu; program pengembangan masyarakat, pengembangan fisik lingkungan, dan pengembangan management lahan) Dari tiga program tersebut dua program diantaranya yaitu pengembangan masyarakat dan pengembangan fisik lingkungan mempengaruhi kesejahteraan sosial serta kemandirian masyarakat miskin perkampungan kumuh. Hal ini mengindikasikan bahwa program KIP-K mampu meningkatkan kesejahteraan sosial serta kemandirian masyarakat sesuai dengan teori pembangunan Todaro dan Sen, yang mengatakan tujuan inti pembangunan adalah kesejahteraan dan kemandirian rakyat. Dengan demikian Teori Pembangunan dari Todaro serta Economic Welfare nya Sen berlaku dalam pelaksanaan program KIP-K. Namun peningkatan kesejahteraan ini masih belum mencapai ketaraf sejahtera dikarenakan beberapa ketentuan untuk mencapai sejahtera tidak terpenuhi, seperti kurangnya usaha untuk meningkatnya kemampuan (*capabilities to function*) baik ekonomi maupun sosial dan budaya seperti diisaratkan oleh Sen. Demikian juga dengan kemandirian masyarakat utamanya di dalam pengadaan modal usaha dan memasuki lapangan kerja. Hal yang positif dari hasil Program KIP-K adalah selain peningkatan pendapatan masyarakat miskin diperkampungan kumuh meningkat juga fisik lingkungan yang lebih bersih dan sehat juga mendorong semangat

masyarakat baik secara bersama-sama maupun secara mandiri untuk memelihara komunitas infrastruktur yang ada. Disamping itu dengan dibangun/diperbaikinya sarana jalan kampung beberapa usaha kecil seperti warung-warung, toko-toko kecil mampu menyerap tenaga kerja utamanya dari kalangan keluarga.

9. Dilihat dari perencanaan yang didasari atas sistem bottom up program ini sangat cocok untuk membangun masyarakat kampung kumuh yang terdiri dari berbagai etnis yang mempunyai budaya yang beragam serta pendidikan yang rendah. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan ekonomi (baik menurut Pasal 33 U.U.D., Indonesian Mellinium Goals, Todaro maupun Swasana) Demikian juga program-program yang dipilih untuk dilaksanakan sesuai dengan teori pembangunan baik dari Todaro, M.P. maupun Sen, A, namun didalam strategi serta tehnik pelaksanaannya kurang memadai, sehingga hasil dari melaksanakan program KIP-K 2002-2003 belum berhasil menciptakan transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi budaya yang pada akhirnya masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini perlu adanya kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendorong pelaksanaan sistem bottom up secara konsekuen dan konsisten terhadap tujuan pokok dari Program KIP-K. Temuan dilapang tidak semua pelaksanaan program didasarkan atas bottom up melainkan masih ada yang menggunakan sistem top down (sebagai contoh penentuan besarnya kredit usaha yang diberikan sama besarnya kepada semua pengambil kredit, tidak didasarkan atas kebutuhan

masing-masing pengambil kredit sesuai dengan skala usaha, macam usaha, kemampuan mengelola usaha dan kekuatan pasar).

10. Dari kesembilan kesimpulan yang telah dibuktikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif terbukti bahwa 2 Program KIP-K yang berupa pengembangan masyarakat dan pengembangan fisik lingkungan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial dan kemandirian serta mampu meningkatkan asset masyarakat miskin permukiman kumuh, yang berarti program KIP-K berhasil mencapai tujuannya, sekalipun kurang maksimal karena dalam tata operasionalnya kurang memadai.

7.2. Saran :

1. Dalam program pembangunan kampung di masa depan, sistem bottom up (sistem partisipasi aktif dari grass-roots) tetap digunakan hanya harus diikuti penelitian individual yang mendalam untuk mendapatkan informasi kemampuan ekonomi (klasifikasi usaha, jenis usaha, kemampuan mengelola usaha, deversifikasi usaha, pemasaran), kemampuan sosial-cultural (social capabilities) untuk dapat digunakan sebagai dasar strategi pelaksanaan. Di samping itu perlu adanya mekanisme monitoring yang lebih ketat untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan dari perencanaannya..
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung di masa depan Pemerintah perlu mengadakan kerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan untuk menjamin compliance dan partisipasi sedangkan organisasi di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, pengembang dan

fihak-fihak lain yang terkait diikutsertakan untuk memberi masukan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan sebagai transfer pengalaman (transfer of experiences). .

3. Dalam pengembangan khususnya di bidang ekonomi perlu diperhatikan terselenggaranya demokrasi ekonomi yaitu terbentuknya pelaksanaan partisipasi dan emensipasi ekonomi secara luas.
4. Dalam pelaksanaan KIP-K komprehensif secara fisik telah lebih berhasil dibandingkan secara ekonomi maupun sosial budaya (tidak terjadinya transformasi ekonomi, transformasi sosial serta transformasi budaya), dengan demikian keberhasilan di bidang fisik ini di dalam proyek pembangunan kampung dimasa datang hendaknya dapat ditransformasikan menjadi keberhasilan non fisik sebagai penggugah sikap dan kegiatan produktif.
5. Pada program/proyek pembangunan kampung kumuh di Kota Surabaya yang akan datang perlu lebih ditujukan kepada penyadaran masyarakat akan pentingnya memandirikan dirinya sendiri (*empowerment*), sadar akan lingkungan (menjaga kebersihan lingkungan), kesehatan, pendidikan, semangat enterpreneurship, melalui transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi budaya.